



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tanggal 20 Nopember 2017 Perihal Peninjauan Kembali Perbup Tarif Puskesmas, Labkesmas dan Griya Sehat, ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal, perlu melakukan peninjauan kembali tarif retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal sesuai dengan perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 13 Seri C No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 138);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF OBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;

BAB II
PENINJAUAN KEMBALI BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah ditinjau kembali sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka tarif retribusi yang diatur dalam :

1. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No.15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 20 Seri E No. 19); dan
2. Peraturan Bupati kendal Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 16 Seri E No.16).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI KENDAL,
Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
Cap Ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 70

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 69
 TANGGAL : 27 Desember 2017

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL

| NO | JENIS PELAYANAN | | TARIF (Rp) |
|----|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | PELAYANAN MEDIK , meliputi : | | |
| | A. | RAWAT JALAN | |
| | 1. | Pelayanan pemeriksaan kesehatan (kir dokter) per sekali pelayanan | 10.000,00 |
| | 2. | Pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon pengantin (per sekali pelayanan) | 25.000,00 |
| | 3. | Pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan asuransi (per sekali pelayanan) | 30.000,00 |
| | 4. | Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli (per sekali pelayanan) | 50.000,00 |
| | 5. | Pelayanan pemeriksaan untuk calon jemaah haji | |
| | | a. Tahap 1 (per sekali pelayanan) | 25.000,00 |
| | | b. Tahap 2 (per sekali pelayanan) | 100.000,00 |
| | 6. | Pelayanan pemeriksaan untuk calon pegawai negeri sipil/pemeriksaan calon legislatif (per sekali layanan) | 275.000,00 |
| | | a. Pemeriksaan fisik | 45.000,00 |
| | | b. Pemeriksaan darah rutin | 50.000,00 |
| | | c. Pemeriksaan urin rutin | 30.000,00 |
| | | d. Pemeriksaan thorax | 100.000,00 |
| | | e. Pemeriksaan EKG | 50.000,00 |
| | 7. | Pelayanan pemeriksaan fisik untuk visum (per sekali pelayanan) | |
| | | a. Orang yang hidup (per sekali pelayanan) | 50.000,00 |
| | | b. Jenazah (per sekali pelayanan) | 100.000,00 |
| | 8. | Pelayanan kesehatan pada anak sekolah (UKS) dikenakan 50% (lima puluh persen) dari biaya yang ditetapkan (per sekali pelayanan) | |
| | B. | RAWAT INAP | |
| | | Paket rawat inap per hari | |
| | 1. | Perawatan Kelas III | 75.000,00 |
| | 2. | Perawatan Kelas II | 100.000,00 |
| | 3. | Perawatan Kelas I | 125.000,00 |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|-----|--|--------------|
| | C. | PERSALINAN | |
| | 1. | Jasa tindakan persalinan normal (per sekali pelayanan) | 1.250.000,00 |
| | 2. | Jasa tindakan persalinan dengan penyulit (per sekali pelayanan) | 1.500.000,00 |
| | D. | PELAYANAN KELUARGA BERENCANA | |
| | 1. | Suntik (per sekali pelayanan) | 15.000,00 |
| | 2. | Implant (per sekali pelayanan) | 100.000,00 |
| | 3. | IUD (per sekali pelayanan) | 100.000,00 |
| | E. | RAWAT JALAN KUNJUNGAN | |
| | | Pelayanan kesehatan diluar gedung puskesmas non keluarga miskin (per sekali pelayanan) | 75.000,00 |
| | F. | PAKET TINDAKAN MEDIK | |
| | 1. | Paket sederhana (per sekali pelayanan) | 20.000,00 |
| | 2. | Paket kecil (per sekali pelayanan) | 40.000,00 |
| | 3. | Paket sedang (per sekali pelayanan) | 100.000,00 |
| | 4. | Paket besar (per sekali pelayanan) | 250.000,00 |
| | G. | PAKET TINDAKAN MEDIK GIGI | |
| | 1. | Paket sederhana (per sekali pelayanan) | 25.000,00 |
| | 2. | Paket kecil (per sekali pelayanan) | 40.000,00 |
| | 3. | Paket sedang (per sekali pelayanan) | 100.000,00 |
| | 4. | Paket besar (per sekali pelayanan) | 220.000,00 |
| | H. | TINDAKAN KHUSUS KEPERAWATAN (pelayanan rawat inap) | |
| | 1. | Vital sign (per hari) | 5.000,00 |
| | 2. | Menyuntik (per hari) | 5.000,00 |
| | 3. | Monitoring/memperbaiki infus (per hari) | 5.000,00 |
| | 4. | Memasang infus/transfusi (per hari) | 10.000,00 |
| | 5. | Memasang O2 | 5.000,00 |
| | 6. | Memberi makan lewat sonde (perhari) | 10.000,00 |
| | 7. | Mengambil sampel laborat (per hari) | 10.000,00 |
| | 8. | Bilas lambung (per hari) | 10.000,00 |
| | 9. | Skarent untuk operasi (per hari) | 10.000,00 |
| | 10. | Mobilisasi (per hari) | 5.000 |
| | 11. | Pemberian obat perrektal (per hari) | 5.000 |
| | 12. | Perawatan tali pusat (per hari) | 5.000 |
| | 13. | Vulva heygin e (per hari) | 10.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|----|---|------------|
| | I. | PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK | |
| | 1. | PAKET PENUNJANG DIAGNOSTIK | |
| | | a. Paket pemeriksaan laboratorium manual (per sekali pelayanan) | 25.000,00 |
| | | b. Paket pemeriksaan Hematology Analyser (per sekali pelayanan) | 50.000,00 |
| | | c. Paket pemeriksaan radiodiagnostik (per sekali pelayanan) | 100.000,00 |
| | | d. Paket pemeriksaan elektromedik (per sekali pelayanan) | 90.000,00 |
| | 2. | PENUNJANG DIAGNOSTIK LUAR PAKET (per sekali pelayanan) | |
| | | a. Laboratorium Klinik (per sekali pelayanan) | |
| | | 1. Gula darah | 17.000,00 |
| | | 2. Colesterol | 30.000,00 |
| | | 3. Trigliserida | 30.000,00 |
| | | 4. SGOT | 25.000,00 |
| | | 5. SGPT | 25.000,00 |
| | | 6. Ureum | 25.000,00 |
| | | 7. Creatinin | 25.000,00 |
| | | 8. Asam Urat | 25.000,00 |
| | | 9. Widal | 35.000,00 |
| | | 10. HbsAg | 35.000,00 |
| | | 11. HDL | 30.000,00 |
| | | 12. LDL | 30.000,00 |
| | | 13. Narkoba | 60.000,00 |
| | | 14. Golongan darah | 10.000,00 |
| | | 15. Kehamilan | 23.000,00 |
| | | 16. Pemeriksaan darah rutin/rutin urin (per item pemeriksaan) | 10.000,00 |
| | | b. Rontgen (per sekali pelayanan) | |
| | | 1. Thorak anak | 65.000,00 |
| | | 2. Thorak dewasa | 70.000,00 |
| | | 3. Thorak Ap/L | 100.000,00 |
| | | 4. BNO/Abdomen | 70.000,00 |
| | | 5. BNO/Abdomen 2 posisi (Ap/L) | 100.000,00 |
| | | 6. BNO/Abdomen 3 posisi (Ap/LLD/semi erect) | 140.000,00 |

| 1 | 2 | | 3 |
|----|----|---|------------------------|
| | | 7. Cranium Ap/L | 100.000,00 |
| | | 8. Sinus Paranasal 2 posisi | 100.000,00 |
| | | 9. Cervical (Ap/L/Oblig kanan/Oblig kiri) | 160.000,00 |
| | | 10. Ekstremitas Ap/L (1 film 2 posisi) | 70.000,00 |
| | | 11. Ekstremitas Ap/L (2 film 2 posisi) | 100.000,00 |
| | | 12. Vertebra Thorakal Ap/L | 100.000,00 |
| | | 13. Vertebra Lumbal Ap/L | 100.000,00 |
| | | 14. Dental | 50.000,00 |
| | | 15. Pelvis Ap/Oblig (2 posisi) | 100.000,00 |
| | | 16. Penambahan proyeksi dengan film kecil | 40.000,00 |
| | | 17. Penambahan proyeksi dengan film besar | 45.000,00 |
| | | 18. Nasal soft tissue (2 posisi) | 100.000,00 |
| | | 19. BNO sonde (5 proyeksi) | 200.000,00 |
| | | c. Elektromedik | |
| | | 1. USG tanpa cetak/print out | 90.000,00 |
| | | 2. USG dengan cetak/print out | 130.000,00 |
| | J. | PEMERIKSAAN IMS DAN VCT | |
| | | 1. KLINIK INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) | |
| | | Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual | 40.000,00 |
| | | 2. KLINIK VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING (VCT) | |
| | | a. Pemeriksaan HIV I (per sekali pelayanan) | 100.000,00 |
| | | b. Pemeriksaan HIV II (per sekali pelayanan) | 100.000,00 |
| | | c. Pemeriksaan HIV III (per sekali pelayanan) | 100.000,00 |
| 2. | | PELAYANAN NON MEDIK meliputi | |
| | 1. | Pengurusan jenazah Perawatan jenazah termasuk memandikan (per sekali pelayanan) | 100.000,00 |
| | 2. | Sewa mobil ambulans/mobil pusat kesehatan keliling tarif minimal sebesar Rp.50.000, (per sekali pelayanan) Rp.4.600/km dengan rincian untuk sumber daya manusia | 50.000,00 + 8500/km |
| | 3. | Barang habis pakai yang digunakan pada pasien yang bersangkutan dikenakan biaya sesuai dengan harga standar yang berlaku umum di pasaran | |

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA